

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Birokrasi merupakan suatu instrumen dalam jalannya suatu administrasi, dalam menjalankan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah. Birokrasi memiliki peran yang sangat penting untuk mewujudkan tugas dan fungsi tersebut. Birokrasi bekerja berdasarkan pembagian kerja, hirarki kewenangan, impersonalitas, pengaturan perilaku dan kemampuan teknis. Hirarki kewenangan dalam sebuah birokrasi mengontrol kewenangan yang dimiliki oleh pimpinan puncak (*The strategic-apec*) yang didesentralisasikan kepada pimpinan pelaksanaan (*The middle-line*). Tujuan desentralisasi adalah untuk menciptakan birokrasi yang profesional yang nanti dapat berdampak pada peningkatan kinerja organisasi jika kontrol yang dilakukan berjalan efektif sehingga birokrasi dapat mempertanggung jawabkan kewenangan yang telah diberikan.

Untuk menciptakan *good and clean Governance*, pemerintah harus memperhatikan pengembangan inovasi pemikiran masyarakat guna menumbuhkan daya saing menghadapi tantangan dan tuntutan zaman. Saat ini diperlukan sebuah instrumen guna menekan angka kemiskinan dan pengangguran dengan memperbaiki perekonomian masyarakat dengan cara pelatihan ketenagakerjaan.

Pembangunan sektor ketenagakerjaan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) saat ini sangat diperlukan. Hal tersebut bertujuan untuk memberdayakan masyarakat yang memiliki keterbatasan pengetahuan. Balai pelatihan kerja pada masing-masing wilayah sangat bervariasi karena disesuaikan dengan potensi, kondisi, karakteristik dan prioritas pada masing-masing daerah. Untuk mengoptimalkan dan mendayagunakan fungsi BLK menjadi lembaga yang profesional maka hal tersebut harus dikembangkan sistem, metode, program, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

Kinerja Balai Latihan Kerja dapat dilihat dari sejauhmana tujuan yang dituangkan melalui penjabaran visi dan misi organisasi, organisasi dapat berjalan baik jika didukung oleh semua sektor yang menjadi pendukung guna menghasilkan output yang diinginkan. Sejalan dengan revitalisasi BLK yang dilakukan pemerintah untuk menciptakan balai pelatihan yang berdaya guna dan berhasilguna diperlukan lembaga pelatihan yang terkelola dengan baik yang mampu mengelola dan memberdayakan sumber daya pelatihan serta sarana dan prasarana yang terstandar, serta instruktur/tenaga kepelatihan yang berkompeten dibidangnya.

Program pelatihan yang diadakan oleh BLK merupakan bagian dari pendidikan, dimana pendidikan pelatihan bersifat praktis, segera, dan mempunyai spesifikasi yang khusus. Pada umumnya pelatihan dimaksudkan untuk memperbaiki penguasaan materi pembelajaran dengan mengembangkan potensi peserta pelatihan dengan berbagai keterampilan kerja dalam waktu yang relatif singkat dengan menggunakan prosedur yang sistematis dan terorganisir.

Pelatihan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 8 Tahun 2017 tentang Standar Balai Latihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja produktifitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai jenjang kualifikasi jabatan dan pekerjaan. Dari definisi tersebut pelatihan untuk tenaga kerja akan membuat tenaga kerja dapat mengembangkan kompetensi kerja di dunia kerja dan diharapkan peserta pelatihan setelah menyelesaikan pelatihan diharapkan mampu berdaya saing dan berdaya guna di lingkungan kerja.

Balai Latihan Kerja di Kabupaten Solok didasarkan pada Kepmenaker No. 184/Men/1984 tanggal 8 Mei 1984 dengan nama Kursus Latihan Kerja Solok (KLK) yang berada dibawah Kanwil Depnaker Prov. Sumbar yang mempunyai wilayah kerja Kabupaten Solok dan Kota Solok, dan daritahun 1986 KLK telah melaksanakan tugasnya sebagai Unit pelaksanaan Teknis (UPT) dibidang Pelatihan tenaga kerja sampai saat ini.

BLK Kabupaten Solok merupakan UPTD dari Dinas Pelayanan Satu Pintu Penanaman modal, dan Tenaga Kerja, yang sumber Pendanaannya berasal dari APBN dan APBP serta APBD Kab. Solok yang digunakan untuk menunjang setiap pelatihan yang telah diprogramkan setiap tahunnya. Struktur Organisasi UPTD BLK berdasarkan Surat Keputusan Bupati Solok Nomor 50 tahun 2018 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi UPTD BLK, yakni adalah melaksanakan tugas dari kantor penanaman modal, pelayanan satu pintu dan Naker Kabupaten Solok di bidang pelatihan keterampilan tenaga kerja dalam rangka penyiapan Tenaga Kerja yang terampil, produktif, disiplin dan efisien dengan berbagai kejuruan, hal tersebut bertujuan untuk memperkuat keberadaan BLK sendiri agar tercapainya Visi dari BLK KabupatenSolok yakni berikut “Tersedianya Tenaga Kerja yang Profesional, mempunyai etos kerja yang tinggi sesuai bidang dan potensinya”. Dari Visi diatas maka ditetapkan bahwa misi UPTD BLK Kabupaten Solok adalah meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kerja melalui peningkatan berbagai jenis pelatihan keterampilan dan keahlian sesuai dengan keunggulan daerah dengan memanfaatkan segala keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia.

Balai Latihan Kerja Kabupaten Solok sampai tahun 2017 sudah melatih siswa sebanyak 1.900 orang yang didanai dengan dana APBN dan APBD dengan rincian siswa pelatihan pada tabel dibawah ini. Dengan dana yang terbatas dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, BLK diharuskan mampu untuk tetap eksis sebagai suatu lembaga yang profesional dalam mengelola dan mengoptimalkan segala bentuk sumberdaya yang ada untuk meningkatkan mutu dan kualitas rekrutmen serta produktifitas peserta pelatihan melalui program pelatihan yang dilaksanakan.

Permasalahan ketenagakerjaan setiap tahunnya semakin meningkat, begitu halnya di Kabupaten Solok. Hal tersebut berdampak pada tingkat pengangguran yang cukup tinggi. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Kabupaten Solok, mulai dari peningkatan tenaga lapangan pekerjaan sampai dengan perlindungan terhadap tenaga kerja. Pengangguran yang terjadi disebabkan oleh tingkat pendidikan masyarakat yang masih relatif rendah, yang mengakibatkan produktifitas masyarakat berjalan *stagnan* sehingga tidak dapat berdaya saing dengan yang lainnya. Selain itu permasalahan ketenagakerjaan seperti masih rendahnya daya saing tenaga kerja dan masih rendahnya kemampuan masyarakat usia produktif dalam menciptakan lapangan pekerjaan.

Hal tersebut yang melatarbelakangi bahwa BLK harus mengutamakan perekrutan masyarakat yang berpendidikan rendah dan berpotensi serta mempunyai keinginan untuk meningkatkan kesejahteraannya. BLK hadir untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat yang minim keterampilan, yang nantinya akan diberikan pelatihan dan keterampilan guna menggali potensi dirinya dan harapan kedepannya menciptakan kader kader tenaga kerja yang dapat berdaya saing dengan pasar dan ahli dibidangnya.

Dilihat dari sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BLK di Kabupaten Solok sangat jauh dari memadai, mulai dari alat penunjang pelatihan sampai dengan gedung pelatihan yang dapat dikategorikan belum memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Peraturan Perundangan undangan yang berlaku yakni Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan.

BLK akan mengalami kesulitan mengadakan program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan Pasar. Namun demikian diantara kelemahan yang dimiliki oleh BLK terdapat nilai penunjang yang dapat dinilai positif yakni instruktur yang dimiliki BLK memiliki keahlian di bidangnya dan sudah sangat berpengalaman, saat ini jumlah instruktur yang ada di BLK berjumlah 12 (Dua Belas) orang, dari berbagai jurusan yang dilatih BLK. Jika dilihat dari jumlah

instruktur yang tersedia dan dibandingkan dengan jumlah peserta di masing-masing jurusan yang akan dilatih, BLK tidak dapat mengakomodir secara keseluruhan, akan tetapi pengalaman para instruktur dapat menutupi kelemahan yang ada.

Pemerintah pada saat ini sedang berupaya mendorong perkembangan wirausahawan melalui pendidikan dan pelatihan yang sistematis untuk mengoptimalkan dan mendayagunakan fungsi, baik itu sistem, metode, program serta sarana dan parasana maupun sumberdaya manusia, seiring dengan hal tersebut maka diperlukan manajemen yang mampu mengelola dan mendayagunakan sumber daya pelatihan secara optimal.

Secara nasional manajemen sumber daya manusia (SDM) memiliki unsur-unsur yang meliputi: jumlah penduduk, perencanaan sumber daya manusia, pendidikan pelatihan, Produktifitas tenaga kerja, penyebaran sektoral dan regional, perkiraan penyediaan dan penawaran serta kebutuhan tenaga kerja dan tingkatan pemberian upah dan pendapatan sebagai proyeksi jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable*) pemerintah harus melakukan pendekatan pemberdayaan yang mengutamakan masyarakat sebagai pelaku dalam pembangunan dengan mengoptimalkan kemampuan dan kompetensi yang dapat diwujudkan dengan pelatihan maupun suatu peningkatan keterampilan.

Daya tampung peserta pelatihan sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah angka pencari kerja (pencaker) yang terdaftar di Dinas Perizinan dan Penanaman Modal, PTSP dan Naker, dan Bulan Desember 2016 angka pencaker yang terdaftar sebanyak 7.736 orang yang terdiri dari 2.787 orang Pria dan 4.949 wanita, sedangkan UPT BLK pada tahun 2017 untuk keseluruhan jurusan hanya mampu melatih sebanyak 190 orang, hanya 0,024% dari jumlah angka pencari kerja yang ada di Kabupaten Solok yang dapat dilatih oleh Balai Latihan Kerja, sehingga output yang dihasilkan oleh BLK tidak signifikan dapat mengurangi angka pengangguran yang ada di Kabupaten Solok, sedangkan jumlah penduduk usia kerja (PUK) Kabupaten Solok selama kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 terus mengalami peningkatan. Hal tersebut secara rinci dapat ditunjukkan pada tabel 1.

Tabel 1. Penduduk Usia Kerja Menurut Golongan Umur Tahun 2014-2017

N	Umur	2014	2015	2017
o				
1	15-19	39.388	32.477	32.570
2	20-24	19.882	26.782	27.099
3	25-29	27.108	28.354	28.073

4	30-34	26.682	25.490	25.969
5	35-39	19.395	24.105	24.030
6	40-44	26.569	22.161	22.697
7	45-49	19.809	20.840	21.427
8	50-54	19.862	19.332	19.556
9	55-59	16.880	17.381	17.890
10	60+	31.629	32.826	34.909
Jumlah		247.204	249.748	254.220

Pada tahun 2014 penduduk usia kerja berjumlah 247.204 orang. Pada tahun 2015 terjadi peningkatan dengan jumlah penduduk usia kerja sebanyak 249.748 orang dan pada tahun 2017, penduduk usia kerja telah berjumlah 254.220 orang menurut data (<https://solokkab.bps.go.id/>). Dapat disimpulkan bahwa usia produktif yang ada di Kabupaten Solok dan angka pencari kerja sangat tinggi persentasenya, hal tersebut menggambarkan bahwa sebagian besar penduduk usia kerja di Kabupaten Solok banyak yang menjadi pengangguran dan bekerja tidak tetap.

Pengangguran terbuka Kabupaten Solok dalam 3 (tiga) tahun terakhir didominasi oleh golongan umur 20-24 tahun. Hal ini disebabkan pada usia tersebut PUK telah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah. Masih tingginya penganggur pada usia muda memperlihatkan tidak terserapnya secara maksimal jumlah usia muda di Kabupaten Solok dikarenakan mereka belum mempunyai pengalaman dan keterampilan yang memadai, hal tersebut erat kaitannya dengan kelembagaan UPTD BLK yang ada di Kabupaten Solok. Kondisi saat ini, bahwa BLK tidak dapat melatih masyarakat dalam jumlah yang banyak yang disebabkan oleh daya tampung yang sangat terbatas. Berikut data pengangguran dapat ditunjukkan dari tabel 2.

Tabel 2. Pengangguran Terbuka Menurut Golongan Umur Tahun 2014-2017

No	Umur	2014	2015	2017
1	15-19	1.683	1.815	2.275
2	20-24	1.355	2.427	5.833
3	25-29	1.392	1.661	1.517
4	30-34	0	466	268
5	35-39	55	0	0
6	40-44	289	0	183
7	45-49	675	0	139
8	50-54	0	0	207
9	55-59	259	217	0
10	60+	0	207	0
Jumlah		5.708	6.793	10.422

Sumber: Data BPS

Dilihat dari tingkat urgensinya, BLK menjadi sangat penting untuk diteliti karena setelah dilakukannya observasi lapangan, diduga bahwa Pemerintah Kabupaten Solok belum

secara optimal meningkatkan fungsi dari BLK sebagai garda terdepan dalam menanggulangi masalah pengangguran, seharusnya Pemerintah Daerah menempatkan BLK prioritas utama dan menjadikan kebijakan strategis daerah dalam menekan angka pengangguran, oleh sebab itu dirasa perlu melakukan pembenahan terhadap BLK karena kenyataannya pada saat ini bahwa tingkat pendidikan masyarakat yang usia kerja di Kabupaten Solok relatif rendah yang didominasi oleh tamatan SD, SMP dan SMA/SMK. Berikut data pengangguran dapat ditunjukkan dari tabel 3.

Tabel 3. Penduduk Usia Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2014-2017

No	Tingkat Pendidikan	2014		2015		2017	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Maksimum SD	105.548	42,70	120.680	48,32	129.024	50,6
2	SLTP	62.587	25,32	60.304	24,15	37.020	14,5
3	SMA/SMK	57.184	23,14	51.698	20,70	57.245	22,5
4	Diploma	8.186	3,3	3.316	1,33	8.863	3,47
5	Universitas	13.699	5,54	13.744	5,50	22.923	8,99
Jumlah		247.204	100	249.748	100	255.075	100

Sumber: Data BPS

Pengelolaan lembaga pelatihan mutlak harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, mengingat dewasa ini keahlian tenaga kerja dihadapkan pada masa depan yang penuh tantangan, karena laju perubahan bergerak sangat cepat, tuntutan dunia usaha akan sumber daya manusia yang terampil semakin tinggi. Seiring dengan kebutuhan tenaga kerja yang terampil makin meningkat, maka BLK dituntut harus mengasihkan lulusan yang sangat produktif, dan BLK harus terus mendukung dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan pelatihan. Kebutuhan tenaga terampil di berbagai bidang sudah merupakan tuntutan dunia global yang tidak dapat ditunda, dan dituntut untuk memiliki kemampuan dalam membuat rencana pengembangan SDM yang berkualitas dengan melakukan perbaikan kedalam melalui pengembangan SDM.

Tantangan Pemerintah Daerah saat ini lebih kepada bagaimana BLK mampu menghasilkan output yang unggulan agar dapat berdaya saing dengan lulusan lainnya, karena kondisi saat ini dibutuhkan SDM yang mampu bersaing serta memiliki skills yang mumpuni dalam menghadapi tantangan globalisasi agar dapat dijual untuk meningkatkan kesejahteraannya. BLK diharapkan mampu menghasilkan siswa yang berkompentensi di masing – masing bidang kejuruan, kondisi saat ini kompetensi SDM wajib dimiliki oleh individu guna meningkatkan perekonomian.

BLK merupakan instrumen dalam pengembangan sumber daya manusia yang nantinya diharapkan mampu menstransfer pengetahuan, keterampilan, dan etos kerja produktif, sejalan dengan pengembangan zaman dan pertumbuhan penduduk maka kualitas dan daya tampung BLK perlu ditingkatkan serta output yang dihasilkan oleh BLK harus dapat berdaya saing dipasar. BLK merupakan metode yang tepat dalam pengembangan ekonomi lokal masyarakat Kabupaten Solok, dengan adanya Balai Latihan kerja sedikit banyaknya dapat memberikan andil dalam meningkatkan SDM masyarakat melalui program kepelatihan dan nantinya keterampilan serta pengetahuan yang didapatkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan di tingkat lokal. Dalam konteks demikian maka penelitian yang akan dilakukan berkaitan dengan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Peran Balai Latihan Kerja dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia”

B. Rumusan Masalah

Dari permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang peran BLK Kabupaten Solok. Pertanyaan penting dalam perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peran BLK Kab. Solok dalam meningkatkan kompetensi siswa di Kabupaten Solok?
2. Apakah dampak yang dihasilkan Balai Latihan Kerja dalam meningkatkan kompetensi siswa dan memperluas lapangan usaha dan kesempatan kerja?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui peran Balai Latihan Kerja dalam meningkatkan kompetensi Sumber daya manusia di Kabupaten Solok.
2. Menganalisis dampak Balai Latihan Kerja dalam meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia, dan memperluas lapangan usaha dan kesempatan kerja.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan terkait Pembangunan Wilayah Pedesaan, khususnya di bidang pengembangan ekonomi lokal masyarakat Kabupaten Solok.
2. Bagi Pemerintah atau Instansi terkait, penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dan evaluasi dalam pelaksanaan pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja.

